

Jelang PENAS Prabowo Bertolak ke Rusia



Prabowo Subianto

GORONTALO - Pertemuan ribuan Petani dan Nelayan se Indonesia, dalam rangkaian Pekan Nasional (PENAS) ke XVII di Gorontalo yang akan berlangsung 20-26 Juni 2026 mendatang, diagendakan dibuka langsung Presiden Prabowo Subianto. Diwaktu yang hampir bersamaan, Kepala Negara terkonformasi memiliki agenda di luar negeri. Presiden Prabowo bakal kembali melakukan lawatannya ke luar negeri, dengan kembali berkunjung ke Rusia pada Rabu 17 Juni 2026, atau tiga hari sebelum PENAS XVII dibuka.

■ Bersambung ke Hal.2



DISWAY

Oleh: Dahlan Iskan



Ilustrasi pengusaha yang tak lagi menghitung peluang perubahan aturan, melainkan menghitung peluang keuntungan.--

Mulai Move-on

HARGA sawit di tingkat petani sudah membaik banyak. Sudah hampir mendekati harga normal sebelum gonjang-ganjing kewajiban ekspor lewat Danantara.

Di Riau petani sawit kemarin sudah dapat harga Rp3.050. Memang belum kembali ke Rp3.200, tapi sudah jauh dari kemerosotan yang sampai Rp2.160. Di Kaltim juga sudah membaik. Sudah kembali ke atas Rp3000, dari tinggal Rp2.200/kg.

■ Bersambung ke Hal.2

Salurkan Infak Dan Waqaf Terbaik Kita Untuk Pembangunan

GORONTALO ISLAMIC CENTRE

DI BANK MUAMALAT

NO REK : 8120999999

LAPORAN KEUANGAN

MASJID RAYA- GORONTALO ISLAMIC CENTRE

Saldo tanggal 29 Mei 2026	
Bank Muamalat	Rp 3.158.290.120
Bank BSG	Rp 355.881.552
Total Saldo	Rp 3.514.171.672
Total perimbangan saldo selang 23 s/d 29 Mei 2026	
	Rp 48.490.524



(FOTO: TANGKAPAN LAYAR/FB)

ARENA PENAS XVII Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo terus dimatangkan persiapannya. Ribuan petani dan nelayan akan hadir di lokasi ini pada 20-26 Juni 2026 mendatang.

MENUJU PENAS XVII KONTINGEN JAMBI TEMPUH JALUR DARAT DAN LAUT

GORONTALO - GP - Antisias Petani dan Nelayan dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke Gorontalo dalam rangkaian Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan ke XVII yang akan berlangsung di Gorontalo, 20-26 Juni 2026 sangat tinggi.

■ Bersambung ke Hal.2



Mulyadi D Mario

TERKAIT OTT BUPATI MUARA ENIM

LIMA PEGAWAI BPK DIRINGKUS KPK

JAKARTA -GP- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima aparat sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. OTT KPK kali ini merupakan lanjutan dari perkara yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Total yang ditangkap KPK dalam OTT kali ini 11 orang, termasuk lima pegawai BPK RI.

■ Bersambung ke Hal.2

SATGAS ANTI MAFIA BOLA DIAKTIFKAN Polri Plototi Taruhan di Pildun

JAKARTA -GP- Ini warning untuk masyarakat. Jangan sampai terpengaruh dengan taruhan atau ajakan judi selama pertandingan piala dunia 2026. Pasalnya, Polri telah mengaktifkan satgas anti mafia bola untuk memplototi praktek perjudian selama gelaran piala dunia.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola, mengantisipasi maraknya praktik perjudian selama gelaran Piala Dunia (Pildun) 2026.

■ Bersambung ke Hal.2



HARGA PERTAMAX
MAKIN MAHAL

Pembelian Pertalite Diperketat

JAKARTA -GP- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM subsidi guna mencegah peralihan konsumsi secara besar-besaran dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi setelah harga Pertamina mengalami kenaikan.

Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan BBM subsidi masih diprioritaskan bagi kelompok masyarakat dan sektor yang memang berhak menerimanya.

■ Bersambung ke Hal.2

Lima Pegawai BPK Diringkus KPK

dari halaman 1

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK menyebut

dari 11 orang yang diamankan, enam di antaranya ditangkap dalam peristiwa OTT bupati Muara Enim. “Lima orang ini merupakan ASN

dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/6).

Kontingen Jambi Tempuh Jalur Darat...

dari halaman 1

Berbagai cara dilakukan, agar bisa datang ke Gorontalo. Seperti yang dilakukan kontingen PENAS XVII dari Provinsi Jambi. Dari daratan Sumatera, mereka menempuh jalur darat ke Gorontalo.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario mengatakan, kondisi harga tiket pesawat yang naik dalam beberapa waktu terakhir, memang membuat kontingen dari berbagai daerah menempuh beragam cara agar bisa tiba di Gorontalo. Seperti yang dilakukan kontingen Jambi, dari informasi yang diterimanya, mereka akan menempuh jalur darat dari Kota Jambi ke Surabaya menggunakan perusahaan otobus (PO) Handoyo. Dari Surabaya, akan lanjut ke

Makassar dengan menggunakan kapal laut KMP Dempo, lalu Makassar ke Gorontalo lanjut dengan jalur daerat menggunakan PO Borlindo. Alternatif lain, kata Muljadi, yakni mereka akan menggunakan pesawat terbang dari Surabaya, ke Manado, kemudian lanjut via darat ke Gorontlao yang jarak tempuhnya paling cepat 8 jam.

“Luas biasa antusiasme dan perjuangan kontingen dari berbagai daerah untuk hadiri Penas di Gorontalo,”kata Muljadi.

Keterbatasan akses transportasi ke Gorontalo dalam menyambut Penas XVII, juga diakui Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dalam wawancara bersama Kompas TV, Kamis (10/6), Gusnar mengatakan, masih ada kurang lebih 700an peserta yang menginformasi belum

mendapat tiket ke Gorontalo. Hal ini tambah lagi dengan harga tiket yang melambung dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut Gusnar, awal pendaftaran sebagai peserta Penas mencapai 30 ribu peserta, namun dengan kondisi yang ada peserta yang dipastikan ke Gorontalo kurang lebih 13 ribu petani dan nelayan. Kata dia, untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya telah meminta maskapai yang melayani rute Gorontalo untuk menambah frekuensi terbang, termasuk memaksimalkan jalur lain seperti darat dan laut.

Beberapa daerah seperti Kaltim, dan Kaltara kata dia, akan menggunakan jalur laut, sementara ada pula yang via Manado, sedangkan daerah-daerah di Sulawesi memastikan datang melalui akses darat. **(tro)**

Menurut Budi, sebelas orang tersebut saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK.

“Siang tadi juga sudah dilakukan ekspose (gelar perkara, red.), dan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah,” tuturnya.

Selanjutnya, penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Dia menjelaskan OTT lanjutan yang merupakan penangkapan ke-13 oleh KPK selama 2026 itu, berkaitan dengan dugaan suap dari pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pihak-pihak di BPK RI.

“Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah smart tv (televisi pintar, red.) yang kemarin sudah kami jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim,” ungkapnya.

Dengan demikian, dia mengatakan perkara OTT lanjutan yang dilakukan KPK berbeda dengan OTT yang menjerat Edison.

Pembelian Peralite...

dari halaman 1

“Sementara untuk memastikan masyarakat tidak beralih secara masif ke BBM bersubsidi, pemerintah terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran,” kata Anggia saat dihubungi, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak salah sasaran.

Anggia mengatakan pihaknya bersama Pertamina akan bersama-sama melakukan pengawasan.

Pengawasan itu dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi digital, pencocokan data pengguna, serta pengawasan bersama antara pemerintah dan Pertamina.

“Pengawasan penyaluran BBM subsidi juga terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, pencocokan data pengguna, serta pengawasan bersama antara pemerintah dan Pertamina,” jelasnya.

Anggia menegaskan langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM subsidi sekaligus memastikan keberlanjutan anggaran negara di tengah dinamika harga energi global. “Pemerintah ingin memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan dan keberlanjutan

“Pada intinya, dua perkara yang berkaitan, namun berbeda. Yang satu suap terkait dengan pengadaan, dan yang satu suap terkait dengan temuan BPK di Pemkab Muara Enim,” kata dia.

Sebelumnya, KPK pada 8 Juni 2026 mengumumkan menangkap sepuluh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), di antaranya lima orang di Jakarta dan lima orang di Sumatera Selatan.

Dalam OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang 2026 itu, Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu dari sepuluh orang yang ditangkap. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025-2026. Keempat tersangka adalah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran pada PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison. **(ant/jpnn)**

Selasa (9/6).

Meski demikian, pemerintah hingga saat ini masih menunggu kepastian agenda resmi perjalanan Presiden ke Rusia tersebut. Ia menyatakan, jadwal lengkap kunjungan masih dalam tahap koordinasi dengan Sekretariat Presiden. “Kita lagi tunggu agendanya dari sekretariat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat melakukan lawatan ke Rusia pada April 2026. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow, pada

Senin (13/4). Pertemuan antara kedua pemimpin negara kala itu membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga investasi. Hubungan Indonesia dan Rusia pun disebut terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Juni tahun lalu, Presiden Prabowo juga telah melakukan kunjungan perdanya di Rusia. Kitika itu, Prabowo juga bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Constantine atau Konstantinovsky pada Kamis, 19 Juni 2025. **(tro)**

Mulai Move-on

dari halaman 1

Kelihatannya tahap “marah” dan “menolak” pada pemerintah sudah lewat. Sudah memasuki tahap “pasrah dan bisa menerima” –meski dengan hati yang mendongkol.

Tidak ada lagi mimpi-mimpi harapan siapa tahu peraturan akan dibatalkan. Atau diperbaiki.

“Hari ini kami sudah menerima peraturan menteri perdagangan,” ujar seorang pengusaha. Ia pun kirim copy Permendag itu. Saya lihat tanggalnya: 29 Mei 2026. Panjang sekali. “Hari ini kami ekspor seperti biasanya. Hanya ada tambahan pekerjaan melaporkannya ke bea cukai,” ujar pengusaha itu.

Lapornya pakai sistem online. Tidak sulit. Tidak perlu lapor secara khusus ke Danantara Sumberdaya Indonesia –anak perusahaan Danantara yang dibentuk khusus sebagai eksporter tunggal hasil sumber daya alam. PT DSI sendiri yang akan ambil laporan itu dari bea cukai.

Sudah tujuh hari ekspor sawit berjalan dengan aturan baru. Yang dimaksud sawit adalah lima jenis produk turunan dari sawit: CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan residunya. Anda sudah tahu singkatan apa saja semua itu.

Memang mereka belum tenang sebenar-benar tenang. Enam bulan lagi aturan yang sebenarnya mulai berlaku: semua ekspor harus lewat PT DSI. Seperti apa wujudnya masih banyak yang meraba-raba. Khususnya dalam menafsirkan pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah yang jadi sandaran Permendag itu. Di situ disebutkan “DSI dapat menentukan margin yang wajar sesuai dengan peraturan perundangan”. Artinya perusahaan sawit akan diberikan laba yang wajar.

Di situ ada dua kata yang multitafsir. Pertama kata “dapat”.

Kedua kata “wajar”. Berarti PT DSI akan menjatah sebuah perusahaan sawit boleh laba berapa. Ini akan menjadi bagian paling rumit dalam pelaksanaannya nanti.

Berapa laba yang wajar itu? Wajar menurut siapa?

Hari ini saya hanya ingin membantu agar kata “wajar” itu tidak terlalu abstrak. Laba adalah hasil penjualan dikurangi biaya. Hasil penjualannya berapa perusahaan sawit tidak akan tahu. Itu urusan PT DSI. Kecuali DSI sengaja membukanya.

Yang perusahaan sawit tahu: berapa biayanya untuk memproduksi salah satu dari lima turunan sawit itu.

Memang akan ada satu kesulitan teknis: perusahaan sawit biasanya punya beberapa PT.

Perusahaan kebun bisa saja di bawah PT tersendiri. Bahkan di bawahnya lagi mungkin saja ada perusahaan khusus pembibitan. Perusahaan kebunnya membeli bibit dari perusahaan pembibitan.

Lalu pabrik CPO-nya di bawah PT pengolahan. Perusahaan tersendiri pula. Perusahaan pengolahan CPO ini membeli bahan baku dari perusahaan kebun. Bahkan bisa saja ada perusahaan khusus eksporter. Perusahaan dagang ini membeli CPO dari perusahaan pengolahan.

Padahal yang akan dikoordinasikan oleh PT DSI adalah perusahaan eksporter. Bukan perusahaan pembibitan, bukan perusahaan perkebunan, bukan perusahaan pengolahan.

Selama ini belum tentu PT yang membawahi pabrik CPO punya izin ekspor. Yang memiliki izin ekspor adalah perusahaan eksporter. Maka dalam menentukan “laba yang wajar” harus dilihat berapa perusahaan eksporter itu membeli barang ekspornya dari pabrik pengolahan sawit –sebagian milik perusahaan eksporter sendiri, sebagian membeli

dari pabrik pengolahan milik perusahaan lain.

Untuk menentukan laba yang wajar itu, awalnya saya ingin menyarankan pakai formula “cost +”. Atau bisa juga pakai formula “cost ++”. Bisa juga “cost +++”.

“Cost +” adalah biaya ditambah suku bunga. Kalau “cost ++” biaya ditambah suku bunga dan biaya inflasi. Sedang “cost +++” ditambah biaya pemeliharaan atau insentif produktivitas. Bahkan kalau mau plusnya ditambah satu lagi: plus keempat adalah biaya riset.

Banyak perusahaan sawit yang melakukan riset yang sangat serius. Riset benih. Riset pupuk. Riset hama. Ini harus ada nilai dan penghargaannya.

Memasukkan biaya pemeliharaan juga amat penting agar kebun terpelihara dengan baik. Jangan sampai pengusaha putus asa: mengabaikan pemeliharaan –akhirnya seperti ayam petelur yang disembelih ayamnya.

Tapi formula “coat +” itu menjadi abstrak mana kala perusahaan eksporter tidak berurusan dengan kebun. Ia membeli barang ekspor dari pabrik pengolahan. Dalam hal begini yang bisa dilakukan hanya formula cost + inflasi dan suku bunga.

Yang jelas perlakuan kepada sawit harus lebih bagus daripada kepada batu bara. Dalam hal sawit pengusaha masih harus riset, membibit, menanam, memelihara, dan mengolah. Perlu otak dan kesabaran. Memiliki kebun sawit sama dengan memelihara benda hidup: bernyawa, bisa sakit, bisa mati, bisa kena wabah dan bisa ngambek.

Pengusaha sawit kelihatannya sudah dalam proses move-on. Petani sudah tidak cemas lagi. Pengusaha sudah mulai berhitung “laba saya akan turun menjadi berapa.” (*)

anggaran negara,” ungkapnya.

Anggia menegaskan Pertamina selama ini selalu menyampaikan kepada publik setiap kali terjadi penyesuaian harga BBM nonsubsidi, baik ketika harga mengalami kenaikan maupun penurunan.

“Pertamina dalam hal ini dan seperti sebelumnya selalu menyampaikan ke publik setiap penyesuaian harga BBM non subsidi baik itu naik ataupun turun,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan saat ini pemerintah tengah merumuskan sejumlah stimulus untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina terhadap masyarakat.

“Itu sedang dirumuskan. Tadi kita diskusinya di sana,” ujar Misbakhun di DPR RI, Rabu, 10 Juni 2026.

Politikus Partai Golkar ini memastikan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM jenis Pertamina bisa mendapat paket stimulus ekonomi dari pemerintah. Kebanyakan, kata dia, pengguna Pertamina merupakan masyarakat yang berimpitan dengan penggunaan Peralite.

“Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamina itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Peralite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus,” jelasnya. **(disway)**

Polri Plototi Taruhan...

dari halaman 1

Dikatakannya, perhelatan sepak bola terbesar di dunia itu berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan praktik perjudian dan aktivitas melanggar hukum lainnya.

Karena itu, Polri memandang perlu mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola sebagai langkah pencegahan dan penegakan hukum.

“Satgas ini akan kita hidupkan kembali, sehingga di satu sisi jangan sampai nanti Piala Dunia ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pelanggaran,” katanya kepada awak media, Rabu 10 Juni 2026.

Diungkapkannya, Piala Dunia seharusnya menjadi ajang hiburan dan pemersatu masyarakat, bukan menjadi sarana praktik perjudian

yang dapat merusak semangat olahraga.

Ia mengajak masyarakat untuk menikmati setiap pertandingan dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas yang menjadi ruh dari sepak bola.

“Kami minta kepada masyarakat, karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam olahraga, tentunya kita menonton dengan suasana yang penuh dengan sportif,” ucapnya.

Pihaknya mengingatkan bahwa semangat fair play dalam olahraga dapat tercoreng apabila disertai aktivitas perjudian yang berpotensi menimbulkan tindak pidana dan berbagai dampak sosial lainnya.

“Jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas itu, antara lain dengan adanya penyelenggaraan masalah judi,” ujarnya. **(disway)**

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman



Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie bersama Kelompok Tani Huyula saat melihat langsung Panen Padi Prebiotik di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Rabu, (10/6/2026).

Petani Wonosari Kembangkan Padi Prebiotik

BOALEMO - GP - Kelompok tani huyula, di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Boalemo, mengembangkan padi dengan teknologi Prebiotik Zero Waste Minyak Kelapa Omega 3. Inovasi pertanian ini mendapat perhatian Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie. Ia meninjau langsung panen padi pada Rabu (10/6). Teknologi pertanian inovatif tersebut saat ini telah diterapkan pada lahan seluas 60 hektar dan panen yang dilakukan merupakan musim tanam ketiga.

Dalam kunjungannya, Wagub Idah mengapresiasi inovasi yang lahir dari masyarakat setempat karena telah menunjukkan hasil yang menjanjikan serta memiliki peluang pasar yang

baik. “Dari hasil yang kita lihat hari ini, padi yang menggunakan pupuk prebiotik memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan padi biasa.

Bulir padinya lebih berisi, dan tampak mengilap. Ini menjadi bukti bahwa inovasi yang lahir dari masyarakat dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian,” ujar Idah.

Selain menghasilkan kualitas gabah yang lebih baik, penggunaan pupuk prebiotik juga dinilai lebih efisien dari sisi biaya produksi. Jika penggunaan pupuk konvensional membutuhkan biaya hampir Rp2 juta untuk satu petak sawah, dengan teknologi prebiotik biaya yang dikeluarkan petani hanya sekitar Rp500 ribu.

“Ini tentu sangat membantu

petani karena dapat menekan pengeluaran secara signifikan. Dengan biaya yang lebih rendah dan hasil yang lebih baik, pendapatan petani juga berpotensi meningkat,” tambahnya.

Wagub Idah juga menyoroti manfaat teknologi tersebut terhadap keberlanjutan lahan pertanian. Berdasarkan hasil pengujian unsur hara yang dipaparkan pengembang teknologi, tanah yang menggunakan pupuk prebiotik tetap terjaga kesuburannya sehingga dapat digunakan secara berulang untuk musim tanam berikutnya tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan. “Petani harus terus berinovasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Dengan inovasi, biaya produksi bisa ditekan, kualitas hasil panen meningkat, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi.

Inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur turut mengajak para petani untuk berpartisipasi aktif dalam Pekan Nasional (PENAS) Tani dan Nelayan XVII yang akan digelar di Gorontalo dalam waktu dekat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi petani untuk menambah wawasan, bertukar pengalaman, serta mempelajari berbagai teknologi pertanian terbaru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian. (tro)

Anteran di Manado Viral, Masyarakat Diajak Bijak Terima Informasi Medsos

MANADO - GP - Kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, berdampak antrean di SPBU, seperti yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Antrean diduga lantaran masyarakat panik dengan stok BBM, kondisi ini beredar di media sosial. Menyikapinya, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, memastikan ketersediaan BBM pasca penyesuaian harga dalam kondisi aman dan terjaga, termasuk yang ada di Kota Manado, Sulut.

Sales Branch Manager (SBM) Sulutgo I Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Mohammad Agung Afrizal, menyampaikan bahwa pasokan BBM subsidi maupun nonsubsidi saat ini tersedia dan terus disalurkan melalui seluruh lembaga penyalur resmi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Pertamina memastikan stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, berada dalam kondisi aman. Penyaluran ke SPBU juga berjalan normal untuk melayani kebutuhan energi masyarakat di Sulawesi Utara,” ujar Agung.

Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap kondisi penyaluran di lapangan serta memastikan distribusi

energi berjalan lancar di seluruh wilayah layanan. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan BBM tersedia dan disalurkan secara berkelanjutan.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Apabila membutuhkan informasi terkait produk, layanan, maupun kebijakan perusahaan, masyarakat dapat mengakses kanal komunikasi resmi Pertamina sehingga informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Lilik. Lilik menambahkan bahwa Pertamina terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi di seluruh wilayah Sulawesi sekaligus memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Apabila masyarakat menemukan kendala layanan maupun indikasi pelanggaran terkait penyaluran BBM, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. (tro)



JANGAN PANIK - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Pastikan Stok BBM Aman dan Layanan Penyaluran Tetap Berjalan Normal.

Purbaya Beri Sinyal Efisiensi Lanjut Pada 2027

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bakal melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2027. Pada rapat paripurna DPR RI, Selasa, Purbaya menyebutkan pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran makin produktif, tepat sasaran. “Mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan dalam

Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemudian, dalam mengelola belanja negara, pemerintah mendorong efektivitas subsidi dan perlindungan sosial (perlinsos) dalam melindungi daya beli dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah, kata Purbaya, secara bertahap mendorong bantuan sosial

(bansos) dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program-program perlinsos berbasis pemberdayaan pun terus didorong dan diperkuat. Di sisi lain, sinergi antarprogram perlinsos dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) terus diperkuat agar intervensi yang dilakukan makin terpadu, saling melengkapi, dan mampu memberikan dampak yang lebih

signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Menurut Purbaya, langkah tersebut diarahkan agar belanja daerah makin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah serta mendukung pencapaian program prioritas nasional. (jpn)

BI Proyeksikan Rupiah Menguat Hingga Rp 16.800/USD

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD ke level Rp 18.000 tak menyurutnya sikap optimisme Bank Indonesia (BI) terkait rupiah ke depan. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memperkirakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD akan menguat di kisaran Rp 16.000 pada tahun 2027.

“Mengenai nilai tukar, kami memperkirakan tahun 2027 rupiah itu akan menguat dalam kisaran rata-rata tahun 2027 Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per dolar AS,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR

RI, Rabu (10/6).

Perry menjelaskan, terdapat lima pertimbangan dasar yang menjadi patokan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada tahun 2027. Adapun, yang pertama adalah adanya potensi perekonomian dunia yang membaik. Menurutnya, meskipun gejala global sulit diprediksi tetapi situasi geopolitik dunia pada tahun 2027 diperkirakan akan mereda atau tidak seburuk seperti yang terjadi pada tahun 2026.

“Pertumbuhan ekonomi akan tinggi di global dan juga persepsi risiko investasi



Perry Warjiyo

diharapkan akan membaik dan karenanya mendorong portofolio inflows dan juga penguatan rupiah,” ujarnya.

Faktor kedua adalah prospek ekonomi fundamental Indonesia yang sekarang baik dan akan semakin baik. Terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inflasi yang terkendali dalam sasaran, neraca perdagangan yang tetap sehat dengan divisi transaksi perjalanan yang masih rendah. Demikian juga imbal hasil investasi di Indonesia yang tetap menarik, pasar keuangan

yang berkembang maupun juga dukungan kecukupan cadangan divisa.

Faktor lainnya yang mendukung penguatan rupiah tahun 2027 adalah implementasi kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam termasuk satu pintu melalui pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perry meyakini kebijakan tersebut akan meningkatkan penerimaan divisa, penerimaan pajak maupun penerimaan negara yang lain dalam jumlah yang besar. “Karena kebijakan ini

tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tersapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan divisa, meningkatkan cadangan divisa dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan,” ungkapnya.

Perry melanjutkan, faktor keempat adalah adanya komitmen kuat dari Bank Indonesia untuk terus menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah. (jp)

Ribuan Polopalo Disiapkan untuk PENAS XVII



UNTUK PENAS - Perajin Polopalo dari Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bone Pantai, Bone Bolango saat mempersiapkan ribuan polopalo yang akan digunakan di arena Penas XVII 2026 di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Lingkaran Korupsi MBG

Sonjaya Ungkap Peran Nama-Nama Besar

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Sony Sonjaya mengajukan diri menjadi justice collaborator atau JC kepada penyidik. Mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu ingin mengungkap peran nama-nama besar yang diduga ikut menikmati duit bancakan tersebut.

Krisna Murti selaku penasihat hukum Sony menyampaikan bahwa salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diduga dikorupsi beramai-ramai. Menurut dia, nama-nama yang ada dalam catatan kliennya sudah diserahkan. Kini, pihaknya tengah menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan pengajuan JC yang sudah disampaikan oleh Sony.

“Klien saya, Pak Sonny, siap menjadi justice collaborator demi membongkar korupsi MBG. Dari pihak Senayan dan Istana. Nama-nama itu sudah kami serahkan ke penyidik Kejagung, jadi tunggu

saja,” ucap Krisna dikutip pada Rabu (10/6).

Menurut Krisna, keputusan Sony mengajukan diri sebagai JC dalam kasus tersebut semakin mantap setelah bertemu dengan dirinya di Rumah Tahanan (Rutan) Kejagung beberapa waktu lalu. Dia memastikan, kliennya akan bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. Pihaknya juga siap membongkar keterlibatan semua pihak. “Kami bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kami ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat dalam program unggulan presiden ini,” imbuhnya.

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Krisna kepada awak media, setidaknya ada 20 nama masuk dalam daftar kliennya. Itu pun belum seluruhnya. Dia menyebut, masih ada nama-nama lain yang juga diduga ikut melakukan korupsi dalam pelaksanaan program MBG. “Lebih dari 20

nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian,” jelasnya.

Krisna berharap, pengajuan atau permohonan kliennya untuk menjadi JC dalam kasus tersebut diterima. Sehingga nantinya penyidik semakin mudah melakukan pengembangan dalam penanganan kasus tersebut. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, dalam kasus tersebut sudah ada 3 orang tersangka. Selain Sony, 2 tersangka lain adalah Dadan Hindayana serta Lodewyk Pusung.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Syarif Sulaeman Nahdi menyampaikan, pada 2025 negara menganggarkan Rp 85,27 triliun untuk pelaksanaan program MBG. Angka itu kemudian naik signifikan pada 2026 dengan total anggaran Rp 268 triliun.

Anggaran sebesar itu mestinya dikelola bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang kredibel.

Namun, oleh ketiga tersangka, duit yang bersumber dari APBN itu malah dicatut lewat yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN. Gawatnya, yayasan-yayasan itu abal-abal atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka (Dadan, Lodewyk, Sony), dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari,” terang Syarif. Penyidik telah memastikan bahwa yayasan-yayasan yang tidak memenuhi kriteria dan tidak kredibel tersebut terafiliasi dengan Dadan, Lodewyk, maupun Sony. Tidak sampai di situ, ketiga mantan unsur pimpinan BGN tersebut juga diduga melakukan korupsi lewat pengadaan barang dan jasa. Mereka mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK). (jp)

Libatkan Masyarakat, Aleg Deprov Femmy Udoki Beri Apresiasi

GORONTALO -GP- Pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke XVII tahun 2026 di Gorontalo, yang akan berlangsung 20 Juni 2026 mendatang bakal meriah.

Ribuan peserta yang hadir akan sama-sama membunyikan polopalo, alat musik bambu tradisional Gorontalo. Salah satu yang menyiapkan polopalo adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo.

Satuan kerja yang dikomandani Sudarman Samad ini termasuk bersama-sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Gorontalo dalam menyiapkan sedikitnya 5000 unit polopalo.

Menariknya, dalam mempersiapkan alat musik yang terbuat dari bambu itu, Dikbud kata Sudarman melibatkan masyarakat perajin yang ada di sejumlah wilayah, termasuk yang ada di pesisir Bone Bolango. “Betul, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan masyarakat dalam memproduksi Polopalo, masyarakat memang sengaja dilibatkan, agar turut merasakan semarak Penas Petani-Nelayan XXI di Gorontalo,” kata Sudarman, diamini Sekretaris Dikbud Provinsi, Sitti M. Lahidjun.

Polopalo yang disiapkan Dikbud Provinsi kata Sudarman untuk tamu VIP pada Penas XVII. Sudarman mengapresiasi cekatan para perajin polopalo yang bisa memproduksi polopalo dalam jumlah banyak, sesuai waktu yang ditargetkan. “Polopalo itu merupakan peninggalan budaya, telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, sebagai sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) nasional, yang alhamdulillah terus dilestarikan,” ujarnya. “Momentum Penas ini, Polopalo diperkenalkan ke seluruh peserta, bahwa Gorontalo punya alat musik tradisional yang masih terjaga sampai saat ini,” tambahnya. Referensi Geografis

Pelibatan masyarakat dalam memproduksi alat musik pololapo yang akan digunakan pada Penas Petani Nelayan ke XVII di Gorontalo, mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki.

Srikandi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, melibatkan masyarakat dalam iven seperti Penas sangat tepat, dan perlu didukung. “Ribuan polopalo ini ternyata di produksi di Bone Pantai, Desa Tunas Jaya, dan wilayah lainnya yang melibatkan masyarakat.

Ini sangat baik, dan saya memberikan apresiasi, ujar Femmy. “Apalagi polopalo ini akan digunakan seluruh peserta Penas, dengan sendirinya diperkenalkan langsung secara nasional, tandas Femmy Udoki. Polopalo yang disiapkan Dikbud Provinsi Gorontalo berasal dari wilayah Bone Pesisir, Tapa, dan Suwawa Selatan. (tro)

Polri Siapkan Nobar di Mabes Hingga Polsek

JAKARTA - Masyarakat Indonesia berkesempatan menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 secara bersama-sama di lingkungan kepolisian. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan jajaran Polri akan menggelar nonton bareng atau nobar gratis mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek di seluruh Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang dibahas Polri bersama TVRI.

Selain penyelenggaraan nobar, kedua pihak juga mendiskusikan dukungan terkait perizinan, pengamanan, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya. Pernyataan itu disampaikan Sigit usai menerima audiensi pihak TVRI di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Menurutnya, Polri menyambut positif

rencana kolaborasi tersebut karena dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Kami sangat menyambut baik terkait dengan rencana kerja sama untuk mendukung program dalam rangka nonton bareng Piala Dunia. Dan kebetulan tadi kami sepakat bahwa kami, Polri, akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar, mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah,” kata Sigit.

Kapolri menilai kegiatan nobar dapat menjadi sarana hiburan yang mudah diakses masyarakat. Terlebih, Piala Dunia merupakan ajang olahraga yang selalu menarik perhatian publik dan memiliki basis penggemar yang sangat besar di Indonesia.

Selain menjadi hiburan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran

penonton di lokasi nobar diyakini dapat membantu menggerakkan aktivitas pelaku usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Sehingga kemudian ini bisa menjadi hiburan masyarakat, hiburan rakyat, sekaligus juga membantu menghidupkan ekonomi daerah dari sisi UMKM tingkat daerah,” ujar Sigit.

Menurutnya, pelaksanaan nobar di berbagai daerah akan membuka peluang bagi pedagang dan pelaku usaha lokal untuk menjajakan produk mereka. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan penonton tetapi juga masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar lokasi acara. Sigit juga melihat kegiatan nobar sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat. Di sela-sela kegiatan, Polri dapat memberikan sosialisasi



Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan program nobar di Polsek, Rabu (10/6).

terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Dan tentunya ini juga bagian dari kegiatan yang bisa kita selipkan untuk hal-hal yang bersifat edukasi untuk masalah-masalah yang terkait dengan harkamtibmas,” ucap Sigit.

Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa kegiatan nobar juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Melalui interaksi yang lebih dekat, diharapkan

tercipta komunikasi yang semakin baik antara Polri dan warga. Ia menilai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat memperkuat kehadiran Polri di tengah kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, jajaran kepolisian akan memberikan dukungan penuh agar program tersebut berjalan lancar. Polri juga siap membantu berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan, mulai dari aspek perizinan hingga pengamanan. Dukungan

tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati pertandingan Piala Dunia dengan aman dan nyaman. “Tentunya kerja sama ini juga menjadi hal yang sangat baik buat institusi Polri, khususnya menjelang Hari Bhayangkara, dan kita akan bantu apa saja yang nanti diperlukan terkait mulai dari perizinan sampai dengan kegiatan keamanan dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Saya kira dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat dan

mari kita nobar bersama-sama Piala Dunia untuk menjadi hiburan bagi kita semua,” tutup Sigit. Pelaksanaan nobar gratis di seluruh Indonesia diharapkan menjadi salah satu agenda yang mempererat kebersamaan masyarakat saat menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

Di saat yang sama, kegiatan tersebut juga diharapkan memberikan manfaat sosial, edukatif, dan ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah. (jp)

PENGUMUMAN (TENTANG SERTIPKAT HILANG) NOMOR : 19/DI304-30.01/VI/2026					
Untuk mendapatkan sertipkat baru sebagai pengganti sertipkat hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :					
No	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.01.07.03.1.00341	CINDRAWATY AMU	-	13/11/2002	
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipkat tersebut diatas maka sertipkat pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan sertipkat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.					
Gorontalo, 09 Juni 2026					
Nomor Berkas : 4450/2026 Nama Pemohon : AL HAMID NUR DAI DI 301 : 2453/2026					

Siap Sambut 7.000 Peserta PENAS-KTNA



PERSIAPAN. Suasana rapat pembahasan persiapan Penas lintas sektor

Bupati Matangkan Persiapan

LIMBOTO-GP-Kesiapan menyambut 7000 peserta Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 terus dimatangkan, terlihat Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Forkopimda memperkuat koordinasi melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Aula Polres Gorontalo, Rabu (10/6).

Bupati Sofyan Puhi mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat sinergi lintas sektor, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek persiapan menjadi fokus pembahasan, mulai dari transportasi, keamanan, pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga kesiapan infrastruktur penunjang kegiatan.

"Koordinasi lintas sektor

harus terus diperkuat agar seluruh kebutuhan dan kendala yang muncul dapat segera ditangani," ungkap Sofyan.

Sofyan lanjut mengatakan, sebagai tuan rumah, kita harus memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal. "Keberhasilan PENAS bukan hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Gorontalo, tetapi juga menjadi cerminan kesiapan daerah dalam menyambut tamu dari berbagai wilayah di Indonesia," ujar Sofyan.

Bupati Sofyan Puhi berharap, kolaborasi seluruh pihak dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan PENAS KTNA XVII 2026 sekaligus memberikan dampak positif bagi promosi daerah, sektor pertanian, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Tonny S. Junus, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira, unsur Forkopimda, serta organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan PENAS. (Wie)

Pemkabgor Cegah Pinjol dan Judi Online

Dukung Program GENCARKAN

LIMBOTO--GP--Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mencegah adanya pinjaman dan judi online.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, saat menghadiri kegiatan Literasi Keuangan dalam rangka Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) 2026 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Rabu (10/6/2026).

Menurut Sugondo, kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan maupun praktik keuangan ilegal.

"Jika tidak dibekali literasi yang baik, masyarakat berpotensi terjebak pada pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga judi online yang saat ini menjadi

perhatian bersama," ujarnya.

Ia menjelaskan, program GENCARKAN merupakan salah satu langkah strategis untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. "Melalui program tersebut, pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan terus mendorong edukasi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan," jelasnya.

Sugondo berharap, kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai

agenda sosialisasi semata, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam mengelola keuangan secara lebih bijak dan produktif.

"Pemerintah daerah mendukung penuh GENCARKAN 2026 agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan secara aman," pungkasnya. (Wie)



SOSIALISASI. Sekda Sugondo Makmur saat menghadiri literasi keuangan

OTOMOTIF

Torang Honda Tebar Promo JUARA DUNIA

Berlaku Untuk Berbagai Segmen Motor Favorit

GORONTALO - GP - Bukan Honda kalau tidak memberikan promo menarik setiap bulanya. Untuk bulan Juni ini, Honda menghadirkan promo Honda JUARA DUNIA (Juni bAnyak pRomo Asik HonDa UNtuk kItA) yang dihadirkan Torang Honda sepanjang Juni 2026. Program ini menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi masyarakat Gorontalo yang ingin memiliki sepeda motor Honda dengan penawaran yang lebih hemat dan menguntungkan.

Melalui program ini, konsumen dapat menikmati uang muka mulai 12%, potongan angsuran hingga Rp100 ribu, serta cashback

jutaan rupiah untuk berbagai tipe sepeda motor Honda. Beragam pilihan promo tersedia mulai dari skutik, motor sport, motor cub, hingga kendaraan listrik Honda. Untuk kebutuhan mobilitas harian, Honda BeAT Sporty, BeAT Street dan Genio hadir dengan cashback Rp1 juta. Sementara bagi konsumen yang mengutamakan gaya dan kenyamanan berkendara, Honda Scoopy menawarkan cashback hingga Rp700 ribu, Honda Stylo 160 cashback Rp500 ribu, Honda Vario 125 cashback Rp700 ribu, Honda Vario 125 Street cashback hingga Rp1 juta, serta Honda Vario 160 dengan keuntungan hingga Rp1,2 juta.

Pilihan promo menarik juga tersedia untuk segmen premium. Honda ADV160 hadir dengan cashback hingga Rp1 juta dan Honda



HONDA JUARA - PT Daya Adicipta Wisesa menghadirkan Juni bAnyak pRomo Asik HonDa UNtuk kItA (HONDA JUARA) untuk masyarakat Gorontalo.

PCX160 hingga Rp1,5 juta, memberikan nilai tambah bagi konsumen yang menginginkan kenyamanan lebih untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh. Tidak hanya itu,

Honda juga menghadirkan promo untuk kendaraan listrik melalui Honda CUV e: dengan total benefit hingga Rp1 juta sebagai solusi mobilitas yang lebih modern dan praktis.

Bagi pecinta motor cub

dan sport, Honda turut menawarkan berbagai keuntungan menarik. Honda Revo dan Supra 125 mendapatkan cashback Rp500 ribu, Honda Supra GTR hingga Rp1,5 juta, CBR150R dengan cashback Rp1,5 juta dan CBR250RR hingga Rp1 juta, CB150R dengan cashback Rp500 ribu, sedangkan untuk CRF150L cashback Rp800 ribu. Selain menghadirkan berbagai promo menarik, Honda juga didukung jaringan layanan purna jual AHASS yang tersebar di berbagai wilayah Gorontalo. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan perawatan kendaraan secara berkala sehingga performa motor tetap optimal. Kami memahami bahwa setiap konsumen memiliki kebutuhan mobilitas yang berbeda. Melalui

program Honda JUARA DUNIA, kami menghadirkan berbagai pilihan promo yang memberikan kemudahan sekaligus nilai tambah bagi masyarakat untuk memiliki sepeda motor Honda yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Panji Sapta Pratama, Sales Department Head PT Daya Adicipta Wisesa. Program Honda JUARA DUNIA berlangsung sepanjang Juni 2026 di seluruh dealer resmi Honda di Gorontalo. Masyarakat dapat mengunjungi dealer terdekat untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai syarat dan ketentuan promo yang berlaku. Informasi terbaru seputar promo, produk, dan aktivitas Honda juga dapat diikuti melalui Instagram @toranghonda, Facebook Torang Honda, dan TikTok @toranghonda. (tro)

Pemerataan Pendidikan Terus Didorong

Disdik Diminta Perkuat Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan

GORONTALO-GP- Masalah putus sekolah masih menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sumber daya manusia di Kota Gorontalo. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dekot) Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menegaskan pentingnya memastikan setiap anak dan

remaja memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga jenjang tinggi.

Menurut Irwan, pendidikan merupakan kunci utama agar generasi muda mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Tanpa akses pendidikan yang merata, kata dia, sulit berharap pemuda bisa menjadi motor penggerak kemajuan daerah.

“Masih ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah. Ini menjadi pekerjaan rumah

besar yang harus dicari solusinya bersama. Kami berkomitmen mendorong agar seluruh anak bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Irwan.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Kota Gorontalo dalam menekan angka putus sekolah beberapa tahun terakhir. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

yang kini mencapai sekitar 79 persen menjadi bukti adanya kemajuan signifikan.

Namun, Irwan menilai capaian tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif. “Kalau pendidikan tidak dijamin, potensi besar pemuda bisa terhambat. Padahal, mereka adalah motor penggerak perubahan,” tegasnya.

Untuk itu, Dekot Gorontalo berkomitmen mendorong



Irwan Hunawa

pemerintah daerah agar memperluas akses pendidikan melalui peningkatan fasilitas, penyediaan beasiswa, serta program pemberdayaan pemuda. Irwan menutup dengan penegasan bahwa masa depan daerah sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. “Jika anak muda diberi ruang untuk belajar, berkembang, dan berinovasi, maka masa depan Gorontalo akan jauh lebih cerah,” pungkasnya. (Adv)

Pembangunan Perumahan ASN Terus Dikawal

GORONTALO -GP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo meninjau langsung pembangunan perumahan aparatur sipil negara (ASN) di Jalan Lupoyo, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan ASN.



Ariston Tilameo

Ketua Komisi III Dekot Gorontalo, Ariston Tilameo, mengatakan pembangunan perumahan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam membantu ASN memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.

“Kamimeninjau langsung program perumahan ASN, dan Alhamdulillah di lokasi ini sudah dibangun lebih dari 51 unit rumah. Sekitar 20 hingga 25 unit di antaranya sudah rampung,” ujar Ariston. Legislator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menambahkan Dekot melalui Komisi III akan terus mengawal program-program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan aparatur dan pelayanan publik.

“Ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ASN. Kami akan terus mendukung dan memastikan program seperti ini berjalan dengan baik,” tambah Ariston.

Untuk itu, Ariston berharap, program ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

“Harapan kami, dengan adanya perumahan ini, ASN tidak lagi terbebani biaya kontrak rumah setiap tahun. Mereka bisa lebih fokus bekerja dan meningkatkan kinerja tanpa terbebani persoalan ekonomi,” pungkasnya. (Adv)



Dokumentasi rapat yang digelar di Aula I Dekot. (F. Istimewa)

Penataan Kabel Provider Jadi Perhatian

GORONTALO -GP-internet di Kota Gorontalo menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo. Pasalnya, Keberadaan kabel dan tiang provider yang semakin banyak di sejumlah ruas jalan dinilai perlu mendapat penanganan serius agar tidak mengganggu estetika kota maupun kenyamanan masyarakat.

Anggota Komisi I Dekot Rolis Ramadhan Helingo, mengatakan perkembangan layanan internet perlu didukung karena menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, pembangunan jaringan juga harus memperhatikan aspek penataan kota agar tetap tertib dan terintegrasi.

Menurutnya, saat ini terdapat beberapa titik yang dipenuhi tiang dan kabel dari berbagai provider. Kondisi tersebut dinilai perlu ditata lebih baik untuk menjaga wajah Kota Gorontalo



Rolis Helingo

sekali memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

“Ini sangat mengganggu baik dari sisi estetika kota serta para pengguna jalan. Oleh karenanya, kami meminta ketegasan pemerintah daerah untuk mendesak provider menertibkan keberadaan kabel-kabel mereka,”

ujar Rolis.

Ia menegaskan, perhatian Dekot bukan semata-mata terkait penerimaan daerah dari sektor pajak perusahaan penyedia layanan internet. Lebih dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan sistem penataan jaringan yang lebih rapi dan terkoordinasi.

“Kami tidak ingin ini hanya sekadar soal pajak. Titik beratnya adalah bagaimana kesemrawutan kabel ini bisa segera diatasi,” katanya.

Sebagai langkah yang dapat dipertimbangkan, Dekot mendorong adanya kerja sama antara provider dengan perusahaan pemilik infrastruktur utilitas seperti Telkom Indonesia maupun PLN. Dengan pola tersebut, penggunaan tiang dapat dipusatkan sehingga tidak menambah kepadatan infrastruktur di ruang publik.

“Jadi semua kabel-kabel mereka itu numpang di dua tiang Telkom atau PLN,” jelas Rolis.

Selain itu, Dekot juga menilai penerapan sistem kabel bawah tanah dapat menjadi solusi jangka panjang yang layak dikaji. Selain mendukung estetika kota, sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko gangguan pada pengguna jalan.

“Dengan sistem tanam di bawah tanah, kabel-kabel itu tidak lagi mengganggu pemandangan dan penggunaan jalan,” tambahnya.

Terakhir Rolis mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi harus berjalan seiring dengan penataan infrastruktur yang baik. Karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet dapat terpenuhi tanpa mengurangi kualitas tata ruang perkotaan. (Adv)

Berlangganan Koran muali dari

IDR 75.000

SCAN ME

Harian Gorontalo Post Cetak & Digital

Koran Digital

GORONTALO POST

ANDA INGIN

Berlangganan Koran Gorontalo Post

atau

KORAN ANDA BELUM DIANTAR AHRI INI

Hubungi :

0812-4470-554

GORONTALO POST

750 Honor Kota Diberhentikan

PORTIVO

METRO-POLES

SHOWBIZ

J&T CARGO

GORONTALO 907A

100% Dijamin Ekonomis

0853 9448 8783 0822 9309 9280 0821 9588 2277

J&T Cargo Gorontalo Post

KIRIM CEPAT, MURAH & BISA BANYAK

Alamat : Jl. Dr. Jhon Aryo Katili No.144 Kel. Paguyaman Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo

RENUNGAN ROHANI BE RADIO - 94.3 FM SETIAP HARI 08.00 WITA

CITY HARVEST CHURCH INDONESIA - GORONTALO

JL. WOLTER MONGINSIDI
CONTACT PERSON 0435-829392
WHATSAPP : 085256276914
INSTAGRAM/FACEBOOK : C HARVEST GORONTALO
YOUTUBE : CHC INDO GTO

IBADAH RALLY PRAYER
SETIAP HARI KAMIS PUKUL 19.30 WITA

IBADAH DOA FAJAR VIA ZOOM MEETING
MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI JUMAT PUKUL 05.00 WITA

BEFORE BED (DOA SEBELUM BERISTIRAHAT)
VIA ZOOM MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI SENIN DAN JUMAT PUKUL 21.00 WITA

GEREJA ANAK (CHILDREN'S CHURCH)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.30 WITA

IBADAH RAYA PAGI (LIVE STREAMING VIA YOUTUBE)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.00 WITA

IBADAH RAYA SORE (DI HOTEL ELIZABETH LIMBOTO, SAMPING POLRES)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

IBADAH STAY : STUDENT-TEENAGE-AND-YOUTH
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

KDMP Buntulia Tengah Siap Operasi

PUNCAK BOTU -GP- Komisi I Deprov Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dalam rangka meninjau kesiapan pembangunan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Rabu (10/06).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan desa, khususnya terkait ketersediaan lahan dan dukungan pemerintah desa terhadap program penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam pertemuan dengan pemerintah desa, diperoleh informasi bahwa pembangunan gedung KDMP di Desa Buntulia Tengah telah selesai beberapa bulan lalu dan saat ini tinggal menunggu proses pengisian serta operasionalisasi koperasi.

Aparat Pemerintah Desa Buntulia Tengah menjelaskan bahwa keberhasilan percepatan pembangunan KDMP tidak terlepas dari ketersediaan aset lahan milik desa yang telah disiapkan sejak awal. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi modal awal dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Wakil Ketua Komisi I Sitti Nurayin Sompie, menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan keseriusan Pemerintah Desa Buntulia Tengah dalam mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan komitmen pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga keberlangsungan koperasi.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menunggu program, tetapi telah memiliki inisiatif dan kesiapan dalam menyiapkan fondasi ekonomi desa. Langkah seperti ini patut diapresiasi karena menjadi bukti nyata keseriusan desa dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Sitti Nurayin Sompie.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi desa harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, bangunan desa, dan aset lainnya yang menjadi milik desa. Seluruh aset tersebut harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

"Kami berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Buntulia Tengah dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi desa," tambahnya. (rmb)



KUNJUNGAN Komisi I Deprov Gorontalo ke desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Pohuwato.



ANGGOTA Komisi III Deprov Gorontalo meninjau Bandara Djalaludin Gorontalo.

KOMISI III TINJAU BANDARA

Deprov Seriusi Persiapan PENAS

PUNCAK BOTU -GP- Komisi III Deprov kemarin (10/6), mendatangi Bandara Djalaluddin dalam rangka meninjau kesiapan sarana dan prasarana transportasi udara menjelang pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang akan berlangsung di Provinsi Gorontalo pada 20-25 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh aspek pendukung penyelenggaraan agenda nasional tersebut berjalan optimal. Persiapan PENAS XVII saat ini dilaporkan telah mencapai lebih dari 75 persen dan diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi III meninjau fasilitas terminal kedatangan dan keberangkatan, kesiapan pelayanan penumpang, sistem transportasi pendukung, serta koordinasi pihak bandara dalam menyambut kedatangan peserta dan tamu

undangan PENAS XVII.

Anggota Komisi III Faisal Hulukati, menyampaikan bahwa Bandara Djalaludin memiliki peran yang sangat strategis sebagai pintu gerbang utama masuknya peserta, tamu, dan delegasi dari berbagai daerah ke Provinsi Gorontalo.

"PENAS Petani dan Nelayan XVII merupakan kegiatan berskala nasional yang akan menjadi perhatian seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan Bandara Djalaludin harus benar-benar maksimal, baik dari sisi pelayanan, keamanan, kenyamanan maupun kelancaran arus penumpang. Kami ingin memastikan bahwa para peserta yang datang memperoleh kesan pertama yang baik saat tiba di Gorontalo," ujar Faisal Hulukati.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan PENAS XVII tidak hanya ditentukan oleh kesiapan lokasi kegiatan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur penunjang, termasuk transportasi udara,

akomodasi, dan fasilitas publik lainnya.

"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pihak bandara dalam mempersiapkan diri menghadapi peningkatan jumlah penumpang selama pelaksanaan PENAS. Komisi III akan terus mendukung dan mengawal seluruh proses persiapan agar kegiatan nasional ini berjalan sukses dan mampu mengangkat citra serta potensi daerah Gorontalo di tingkat nasional," tambahnya.

Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak pengelola bandara guna memastikan seluruh kebutuhan teknis dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan PENAS XVII. Dengan sinergi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan, Gorontalo diharapkan mampu menjadi tuan rumah yang sukses dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta yang hadir. (rmb)

Kesenjangan Literasi AI Guru Masih Jadi Tantangan Pendidikan

Penguasaan Teknologi Dinilai Menentukan Kualitas Pembelajaran di Era Society 5.0

GORONTALO-GP- Transformasi digital yang berlangsung cepat di dunia pendidikan menghadirkan tantangan baru bagi para guru. Di tengah masifnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), masih banyak tenaga pendidik yang belum memiliki keterampilan memadai untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai kalangan pendidikan. Pasalnya, AI kini tidak lagi dipandang sebagai teknologi masa depan, melainkan

telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi tersebut dikhawatirkan justru memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran.

Ketua Program Studi S2 Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Abd Aziz Bouty, mengatakan perkembangan teknologi pada era Society 5.0 menempatkan manusia dan teknologi dalam hubungan yang semakin dekat. Karena itu, guru dituntut mampu beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.

Menurutnya, berbagai hasil penelitian menunjukkan sebagian besar guru telah memahami manfaat teknologi AI dalam mendukung pekerjaan mereka. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan teknis untuk

menggunakannya secara efektif.

"Di era Society 5.0 ini, pengembangan teknologi semakin dekat dengan manusia. Banyak guru merasa penggunaan teknologi ini sangat bermanfaat, tetapi belum diimbangi dengan keterampilan. Karena itu perlu ada upaya untuk mendorong guru agar termotivasi dan mampu memanfaatkan teknologi AI dalam bekerja," ujarnya. Abd Aziz menjelaskan, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu guru menyusun perangkat pembelajaran, membuat media ajar yang lebih menarik, hingga mengelola administrasi pendidikan secara lebih efisien. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, teknologi tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal bagi proses belajar mengajar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur

digital, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Literasi digital dan kemampuan memanfaatkan AI menjadi kompetensi baru yang harus dimiliki tenaga pendidik. Pandangan serupa disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris. Ia menilai penguasaan teknologi berbasis AI kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para guru.

"Di era globalisasi dan tantangan zaman saat ini, penguasaan teknologi AI menjadi hal yang wajib bagi para guru. Perkembangan teknologi berjalan sangat cepat, sehingga tenaga pendidik harus terus meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini," katanya.

Menurut Abdul Waris, kemampuan memanfaatkan AI bukan sekadar mengikuti

tren teknologi, tetapi menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Guru yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dinilai akan lebih mudah menghadirkan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menarik bagi siswa.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Fera Vandi Suharto Mooduto, menilai masih banyak guru yang belum memanfaatkan AI karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan pengetahuan hingga minimnya pengalaman penggunaan teknologi tersebut dalam pembelajaran.

"Guru tidak bisa lagi hanya melakukan proses pembelajaran secara konvensional, tetapi juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya AI. Penggunaan AI sangat bermanfaat bagi guru, namun masih banyak yang belum menggunakannya. Ini yang menjadi tantangan bersama," tuturnya. (Tr-76)



BESOK PIALA DUNIA 2026 RESMI BERGULIR!

48 NEGARA SIAP BERSAING

Ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026, siap digelar di tiga negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Turnamen edisi ke-23 ini akan menjadi yang pertama menggunakan format 48 peserta yang dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi empat tim. Acara ini diselenggarakan bersama di 16 kota yang tersebar di tiga negara tuan rumah: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko

Pertandingan Pembuka:

Laga perdana menampilkan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan yang dilangsungkan di Stadion Azteca, Mexico City

Upacara Pembukaan:

Acara megah ini dimeriahkan oleh penampilan langsung dari superstar dunia, yaitu Shakira dan Burna Boy

Hak Siar di Indonesia:

Seluruh rangkaian pertandingan disiarkan secara resmi dan gratis melalui saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport

Jadwal Laga Penting Lainnya:

Amerika Serikat dijadwalkan akan menghadapi Paraguay pada 12 Juni 2026 di Los Angeles, sementara partai final penentu juara akan digelar di Stadion New York/New Jersey pada 19 Juli 2026.



Dibuka dengan Duel Meksiko Vs Afrika Selatan

BAGI Afrika Selatan, laga pembuka di Mexico City pada (12/6) dini hari WIB ini akan menjadi momen ulangan dari Piala Dunia 2010. Tepat 16 tahun silam, skuad Bafana Bafana yang saat itu berstatus tuan rumah ditahan imbang 1-1 oleh Meksiko. Gol indah Siphiwe Tshabalala kala itu sukses disamakan oleh Rafael Marquez, sebelum akhirnya langkah Afrika Selatan asuhan Carlos Alberto Parreira terhenti di fase grup. Kini, datang dengan status non-

unggulan dan tanpa keuntungan bermain di publik sendiri, persiapan Afrika Selatan di bawah arahan pelatih Hugo Broos menemui sejumlah kendala. Tim ini mencatatkan hasil kurang memuaskan jelang turnamen, yakni ditahan imbang 0-0 oleh Nikaragua dan kembali bermain seri 1-1 kontra Jamaika dalam laga tertutup. Terkait performa timnya, pelatih asal Belgia itu tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya.(net)



RANKING FIFA INDONESIA

NAIK 4 PERINGKAT!

RANK	TEAM	MATCH +/-	POINTS
116	THE GAMBIA	-	1159.64
117	SUDAN	-	1157.22
118 ↑ 4	INDONESIA	✓ +6.56	1151.45
119 ↓ 1	KOREA DPR	-	1151.05
120 ↓ 1	SIERRA LEONE	-	1148.98

FIFA MATCHDAY 2026

Usai Hajar Oman dan Mozambik

Timnas Indonesia Naik Peringkat ke-118 Dunia

KEMENANGAN atas Mozambik 0-1 pada ajang FIFA Matchday, membuat Timnas Indonesia naik dari ranking ke-119 dunia ke peringkat 118 dunia. Sebelumnya tim asuhan John Herdman itu mengalahkan Timnas Oman 3-0. Artinya dalam

dua kemenangan yang diraih itu, tim Merah Putih naik empat peringkat. Sebelum bertanding melawan Oman di urutan 122. Kemenangan atas Mozambik sendiri memberi tambahan 5,69 poin buat Indonesia, sehingga total mengumpulkan 1157,14 poin. Sementara tim Mozambik harus tergerus 5,69 poin, yang membuat tim Afrika itu turun dari ranking 102 ke 103 peringkat dunia. Sementara pada laga terakhir Timnas Indonesia gol semata wayang striker andalan Timnas Indonesia, Ole Romeny membawa

tim “Merah Putih” meraih kemenangan ganda . Gol tunggal Ole dicetak menit ke-11 babak pertama setelah lepas dari jebakan off side, dan dengan tembakan kaki menjebol gawang Mozambik. Aksinya berkelas menyambut umpan Ragnar, dengan sekali sentuh langsung mengeksekusi dengan cepat setelah mengecoh kiper Ivan Carminio.

Gol tunggal itu menjadi pembeda pertandingan itu, sekaligus memastikan kemenangan kedua Timnas Indonesia secara beruntun pada pertandingan bertajuk Garuda Championship Series itu.(net)

Kejati Sulut Usut 39 Instansi di Gorontalo



Terkait Aliran Dana Bantuan CSR BSG

GORONTALO - GP-Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) saat ini tengah mengusut aliran dana bantuan ke Provinsi Gorontalo terkait Corporate Social Responsibility (CSR) Bank SulutGo (BSG) tahun 2023-2024. Tak tanggung-tanggung institusi Adhyaksa Sulut itu memeriksa sebanyak 39 instansi di Provinsi Gorontalo selama dua hari terakhir.

Informasi yang berhasil dirangkum Gorontalo Post, sejak Selasa (9/6/2026) sekitar 13 organisasi/instansi yang telah diperiksa. Selanjutnya pada Rabu (10/6/2026) sebanyak 26 organisasi/instansi yang diperiksa oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulut yang berjumlah tiga orang. Tempat pemeriksaan dilakukan di ruang Pidsus Kejati Gorontalo. Para pimpinan instansi tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi yang menerima dana CSR dari BSG.

Salah satu pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Gorontalo Zainudin Bonok saat diwawancarai mengatakan, dirinya juga ikut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi yang pernah menerima aliran dana bantuan CSR dari BSG. "Kami pernah menerima bantuan CSR dari BSG untuk masjid sebesar Rp 25 juta. Tapi yang kami terima hanya Rp 24,5 juta, dipotong Rp 500 ribu," kata Zainudin Bonok. Lebih lanjut Zainudin mengaku dirinya dimintakan sejumlah dokumen penting yakni Kartu Tanda Penduduk, LPJ, rekening koran, proposal, SK, Rekom

kemenag dan Keterangan hingga domisili kelurahan. Zainudin mengakui pula bahwa bukan hanya dirinya pimpinan ormas/instansi yang diperiksa, melainkan sejumlah instansi lain. "Lumayan banyak penerima csr Bsg melalui pemda kota yang datang sejak kemarin dan har ini antri menunggu giliran diperiksa," ungkap Zainudin.

Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Arief Mulya Sugiharto saat dikonfirmasi membenarkan adanya puluhan saksi dari puluhan instansi-organisasi di Gorontalo yang diperiksa Kejati Sulut. "Yang diperiksa Kejati Sulut. Kami Kejati Gorontalo hanya sebatas memfasilitasi tempat saja. Terkait materi pemeriksaan kami juga belum tahu. Nanti saya tanya timnya dulu ya," tandas Arief. Dikutip dari sejumlah media online menyebutkan, berdasarkan LHP BPK yang dirilis April 2026, terdapat biaya Rp 47,44 miliar dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BSG yang diduga melanggar aturan. Dari LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bernomor 8/LHP/XIX. MND/04/2026 yang dirilis 10 April 2026, mengungkap temuan terkait pengelolaan dana CSR/TJSL BSG tahun anggaran 2023 hingga 2024. Dokumen resmi itu menemukan penyimpangan masif, cacat prosedur, dan indikasi kuat tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp47,442 miliar. Diketahui, LHP ini telah diserahkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen itu kini menjadi dasar utama proses hukum yang sedang berjalan. (roy)

Diduga Arus Pendek

Satu Rumah di Limboto Terbakar

LIMBOTO-GP-Diduga akibat arus pendek, rumah milik Refan Ramadhan di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, hangus terbakar. Rabu (10/6) Berdasarkan informasi yang didapatkan, dari ibu Tati selalu Tetangga, mengaku jika rumah dalam keadaan kosong dan yang tinggal di rumah hanya seorang siswa. Api berasal dari bagian belakang rumah, melihat api yang mulai membesar di bagian belakang rumah, Ibu Tati meminta tolong kepada karyawan Objek Wisata LU'AS untuk menghubungi petugas Damkar Kab. Gorontalo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Saya kaget api sudah mulai membesar, sementara kondisi cuaca panas dan tidak ada

orang sekitar, makanya saya mendatangi objek wisata LU'AS yang pastinya banyak karyawan untuk menghubungi damkar dan alhamdulillah satu orang karyawan langsung bergerak menuju kantor Damkar," ungkap ibu Tati.

Kepala UPTD Damkar Farid Taha mengungkapkan, setelah menerima laporan dari ibu Melisa selalu karyawan objek wisata LU'AS pukul 15.45 WITA, petugas langsung bergerak dan hanya memakan waktu tiga menit petugas sudah langsung berada di lokasi. "Sesampainya di lokasi rumah sudah habis terbakar dan anggota Damkar langsung melakukan pendinginan dan melokalisasi penyebaran titik api," ungkap Farid. Lanjut dikatakan Farid berdasarkan keterangan



Rumah milik Refan Ramadhan di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, hangus terbakar. Rabu (10/6)

saksi, dugaan sementara kebakaran diakibatkan dari korsleting arus pendek. Seluruh bagian bangunan tripleks GRC habis terbakar total, termasuk atap, dinding, lantai dan seluruh

isi perabotan serta barang milik penghuni. Tidak ada bagian bangunan yang tersisa utuh, namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa," pungkas Farid. (Wie)

Polisi Grebek PETI di Bonedaa

BONE BOLANGO - Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango kembali melakukan penindakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi di wilayah Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa Selatan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 13 orang serta menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal.

Kapolres Bone Bolango,

AKBP Supriantoro, mengatakan penindakan itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima jajaran Polsek Suwawa terkait adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan aliran Sungai Dumaya Tinaloga, Desa Bonedaa.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel kepolisian segera bergerak ke lokasi guna melakukan pengecekan dan penertiban. Saat tiba di tempat

kejadian, petugas menemukan sejumlah aktivitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa memiliki izin resmi.

"Informasi awal kami peroleh dari masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, tim langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penindakan," ujar AKBP Supriantoro

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bone Bolango, AKBP Robin Talib, menjelaskan bahwa operasi penertiban dilakukan pada Kamis (21/5). Dari hasil kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 13 orang yang berada di lokasi penambangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di area tambang. Barang bukti tersebut terdiri dari enam unit alkon, enam unit selang, lima lembar karpet berwarna merah, tiga unit jet, serta tiga unit selang penembak yang diduga digunakan dalam aktivitas pengolahan material tambang.

Tak hanya itu, petugas turut

menemukan dan mengamankan sekitar 10 gram air raksa yang berada di lokasi. Temuan tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang akan didalami dalam proses penyidikan.

AKP Robin menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan tersebut diperkirakan telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

Saat ini, seluruh pihak yang diamankan diwajibkan untuk melapor dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mendukung proses penyidikan. Kepolisian juga terus mendalami keterlibatan masing-masing pihak serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Polres Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (tha)



Barang bukti yang berhasil di amankan jajaran Polres Bone Bolango dilokasi tambang ilegal di Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa Selatan. Kabupaten Bone Bolango.

FOTO: NATHARAHMAN/ GORONTALO POST

Parkiran Bentor di Pasar Terminal 42 Amburadul

GORONTALO - GP-Parkiran becak motor (bentor) di kawasan pasar tradisional Terminal 42 Kota Gorontalo kian amburadul, Rabu (10/6/2026). Hal ini praktis memicu kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Pasalnya, para pengemudi bentor terkesan mengabaikan larangan parkir sembarangan di bahu hingga badan jalan.

Pantauan Gorontalo Post, Rabu (10/6/2026), deretan bentor diparkir di tengah ruas jalan dengan posisi dua jalur. Kondisi ini praktis memicu kemacetan arus lalu lintas ketika hari pasar tiba. Kacaunya parkir di pasar terminal 42 juga salah satunya dipicu tidak adanya petugas Satuan

Polisi Pamong Praja maupun Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Lisna Husain warga Sipatana Kota Gorontalo mengungkapkan, tukang parkir kendaraan di pasar 42 juga ikut kewalahan mengatur bentor yang sembarangan parkir di bahu jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hj. Hermanto Saleh, S.IP, saat dikonfirmasi mengatakan, Penataan parkir bentor di pasar terminal 42 sana memang anggota Dishub sudah lakukan, namun mungkin karena memang personel yang terbatas sehingga para pedagang juga sudah keluar dan menggunakan trotoar yang ada untuk melakukan aktivitas jual beli. (roy)



FOTO: ROY/GORONTALO POST

Kondisi kemacetan lalu lintas yang kian parah di kawasan pasar tradisional Terminal 42 Kota Gorontalo, Rabu (10/6/2026).

Laut yang Tak Pernah Kita Kenali Sepenuhnya

ADA ironi besar yang tersimpan dalam cara kita memandang laut. Kita menyebutnya kekayaan nasional, warisan peradaban, dan kini ekonomi biru. Namun kita tidak benar-benar tahu berapa nilainya. Bukan karena laut kita miskin, melainkan karena kita belum pernah serius menghitungnya.

Gorontalo adalah tempat yang tepat untuk memulai percakapan ini. Diperairan Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, hiu paus (*Rhincodon typus*) hadir hampir setiap hari hanya dua puluh lima meter dari bibir pantai. Kedekatannya dengan daratan begitu luar biasa hingga kawasan ini meraih rekor MURI sebagai habitat hiu paus terbesar di dunia. Namun, kita sebagai masyarakat di Indonesia, dalam enam bulan, lebih dari 18.700 wisatawan berdatangan. Pada Januari 2025, Desa Wisata Botubarani menerima 4th ASEAN Community-Based Tourism Award dalam ajang ASEAN Tourism Awards di Johor Bahru, Malaysia. Secara regional, nilainya sudah diakui. Namun secara ilmiah dan kebijakan, kita masih buta: berapa nilai ekologi hiu paus itu bagi ekosistem yang menopangnya? Berapa biaya yang harus kita siapkan jika suatu hari populasinya menyusut karena tekanan yang tidak terkelola? Tidak ada yang bisa menjawab, bukan karena pertanyaannya tidak penting, melainkan karena datanya belum ada.

Ini lah yang membuat konsep akuntansi

biru (*blue accounting*) menjadi mendesak untuk diperbincangkan, jauh melampaui ruang akademis. *Blue accounting* bukan sekadar cabang ilmu akuntansi yang diterapkan pada sektor kelautan. Ia adalah sebuah kerangka pengukuran yang berupaya mendokumentasikan kondisi aset laut secara utuh, meliputi stok sumber daya, fungsi ekosistem, kapasitas penyerapan karbon, hingga kontribusi sosial dan ekonomi yang dihasilkannya. Dengan sistem ini, laut tidak lagi diperlakukan sebagai ruang tanpa neraca, tempat kita boleh mengambil sebanyak yang kita mau tanpa ada catatan atas apa yang tersisa.

Selama ini, cara kita melaporkan “kemajuan” di sektor kelautan hampir selalu bertumpu pada output ekonomi jangka pendek. Seberapa besar nilai ekspor hasil laut, seberapa tinggi angka kunjungan wisata bahari, seberapa banyak investasi yang masuk. Angka-angka semacam itu memang penting, tetapi tidak cukup. Ia ibarat laporan keuangan perusahaan yang hanya mencatat pendapatan tanpa pernah melaporkan penyusutan asetnya. Dalam akuntansi, praktik seperti itu tidak hanya keliru, tapi juga menyesatkan pengambilan keputusan.

Kenyataan di lapangan seharusnya mendorong kita untuk lebih serius. Teluk Tomini, yang melingkupi perairan Gorontalo, diakui dunia sebagai jantung segitiga terumbu karang (*heart of coral*



Oleh :
Susanty Ismail

triangle), kawasan yang menaungi lebih dari 76 persen spesies terumbu karang di seluruh bumi. Kekayaan ekologis yang luar biasa ini seharusnya menjadi argumen terkuat mengapa sistem pencatatan nilai laut harus segera dibangun di sini. Ironisnya, justru kawasan ini tidak masuk dalam sepuluh lokasi percontohan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) yang diluncurkan pemerintah pada Juli 2024. Pilot tersebut mencakup Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, dan Pulau Kapoposang. Semuanya penting. Tapi ketidakhadiran

Teluk Tomini dalam daftar itu bukan sekadar kekosongan administratif; ia adalah sinyal bahwa daerah dengan potensi terbesar belum tentu mendapat perhatian yang setimpal.

Pemerintah memang tidak berdiam diri. Indonesia memprakarsai Bogor Action Plan pada April 2026, sebuah komitmen regional Asia-Pasifik untuk mempercepat implementasi *ocean accounting*. Di tingkat nasional, NSDL mulai dikembangkan sejak 2021 dan secara resmi diluncurkan pada 2024. Ini semua adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun apresiasi tidak boleh membuat kita berhenti bertanya: seberapa dalam komitmen itu berakar? Seberapa kuat koordinasinya antar kementerian? Seberapa jauh jangkauannya ke daerah-daerah yang justru paling kaya namun paling jarang disebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan retorika. Kajian akademik dan *policy brief* dari para peneliti kelautan Indonesia sendiri mencatat bahwa fragmentasi data antar lembaga masih menjadi hambatan utama. Kementerian yang satu tidak berbagi basis data dengan kementerian yang lain. Akibatnya, gambaran menyeluruh tentang kondisi sumber daya laut nasional tidak pernah benar-benar terbentuk, dan kebijakan kelautan dirumuskan di atas fondasi yang tidak kokoh.

Untuk mengubah ini, ada beberapa hal yang perlu didorong secara bersamaan.

Pertama, perluasan pilot NSDL harus menjangkau kawasan-kawasan yang selama ini belum terwakili, termasuk Teluk Tomini dan perairan Gorontalo, dengan mempertimbangkan kompleksitas ekologisnya sebagai prioritas, bukan sekadar kemudahan administratif. Kedua, integrasi data lintas kementerian perlu diikat oleh regulasi yang memiliki daya paksa, bukan sekadar kesepakatan yang mudah terabaikan. Ketiga, universitas dan lembaga riset di daerah perlu dilibatkan secara aktif sebagai produsen data lokal, bukan hanya sebagai konsumen kebijakan yang dirancang dari pusat.

Blue accounting pada titik ini bukan lagi sekadar urusan para akuntan atau ilmuwan kelautan. Ia adalah soal kejujuran kita dalam mengelola apa yang kita warisi. Kita bisa terus berbicara tentang ekonomi biru sebagai produsen data lokal, bukan hanya sebagai konsumen kebijakan yang dirancang dari pusat.

Laut Gorontalo bukan hanya pemandangan. Ia adalah neraca yang belum selesai ditulis. (*)

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Sains Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo

Industrialisasi, Ekologi, dan Akal Budi Pancasila

BERBERAPA waktu terakhir, ruang publik disergap oleh kegelisahan baru tentang arah pembangunan. Sebuah dokumenter yang ramai diperbincangkan memperlihatkan sisi muram dari kemakmuran ekstraktif: kemewahan yang berdiri di atas lanskap rusak, akselerasi ekonomi yang meninggalkan kecemasan ekologis, dan komunitas lokal yang menanggung ongkos paling senyap dari proyek-proyek besar pembangunan. Ia tidak sekadar menggugah emosi publik, tetapi memaksa kita mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: pembangunan seperti apa yang secara moral masih dapat dibenarkan oleh Pancasila?

Pertanyaan itu penting karena Indonesia sedang memasuki fase baru transformasi ekonomi. Hilirisasi, industrialisasi hijau, mineral kritis, kendaraan listrik, kawasan industri, transisi energi, dan rantai pasok global kini menjadi kosakata utama pembangunan nasional. Tetapi kosakata modern tidak selalu menjamin arah pembangunan yang berkeadaban. Tidak setiap pabrik menandai transformasi struktural. Tidak setiap investasi menciptakan kemajuan sosial. Tidak setiap ekspor bernilai tambah menghadirkan keadilan bagi pekerja, warga lokal, dan alam.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar PDB, sekitar 19,07 persen. Angka-angka itu penting, tetapi Pancasila mengajukan ukuran yang lebih tinggi daripada sekadar pertumbuhan. Pertanyaannya: apakah pertumbuhan itu memperluas martabat manusia, memperkuat kemampuan produktif nasional, menjaga ruang hidup, dan mendistribusikan manfaat secara adil kepada daerah penghasil sumber daya?

Arsitektur Moral Ekonomi

Pancasila tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai konsensus historis atau dekorasi seremonial dalam kehidupan bernegara. Ia adalah arsitektur moral ekonomi-politik untuk mengatur relasi antara negara, pasar, masyarakat, tenaga kerja, dan alam. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukanlah penutup retorik dalam pidato kenegaraan.

Ia adalah mandat normatif agar pembangunan dinilai dari akibat distributif, ekologis, dan kelebagaannya.

Rodrik (2004) mengingatkan bahwa perdebatan tentang kebijakan industri bukan terletak pada pertanyaan apakah negara boleh melakukan intervensi. Negara selalu hadir dalam ekonomi, baik melalui perizinan, insentif fiskal, infrastruktur, subsidi, tarif, maupun regulasi. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah intervensi itu disiplin, akuntabel, dan diarahkan untuk membangun kemampuan produktif. Dengan kata lain, industrialisasi harus menghasilkan pembelajaran, bukan sekadar ekspansi kapasitas produksi.

Karena itu, hilirisasi tidak cukup dinilai dari jumlah smelter, volume ekspor, atau besarnya realisasi investasi. Hilirisasi harus diuji dari kemampuannya menciptakan alih teknologi, memperkuat pemasok domestik, memperdalam struktur industri nasional, meningkatkan keterampilan pekerja, serta memperluas basis inovasi. Tanpa itu, hilirisasi hanya akan menjadi ekstraktivisme yang naik tingkat secara teknis, tetapi tetap miskin secara sosial dan ekologis.

Ambiguitas Hilirisasi

Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan besarnya ambisi tersebut. Pada triwulan III 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp491,4 triliun. Dari jumlah itu, sektor hilirisasi menyumbang Rp150,6 triliun, atau sekitar 30,6 persen dari total investasi. Angka ini mengesankan, tetapi investasi besar tidak otomatis identik dengan transformasi yang inklusif. Hirschman (1958) mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: apakah hilirisasi menciptakan *backward linkage* atau *forward linkage* yang nyata? Apakah perusahaan lokal masuk dalam rantai pasok? Apakah tenaga kerja daerah memperoleh peningkatan keterampilan? Apakah wilayah penghasil sumber daya membangun basis ekonomi baru yang lebih beragam? Ataukah yang terbentuk justru enklave industri padat modal yang terkoneksi kuat dengan pasar global, tetapi terputus dari ekonomi lokal?

Mazzucato (2013) menegaskan bahwa negara tidak seharusnya hanya menjadi penanggung risiko bagi modal swasta.

Oleh :
Fahmi Prayoga, S.E

Negara harus menjadi pembentuk pasar dan penuntut nilai publik. Bila negara menyedhiakan insentif fiskal, kemudahan izin, infrastruktur, akses lahan, dan dukungan energi, negara berhak menuntut imbal balik yang jelas: transfer teknologi, produksi yang lebih bersih, peningkatan kualitas kerja, penguatan industri domestik, dan kontribusi nyata bagi daerah.

Kerja dan Martabat

Lewis (1954) membaca pembangunan sebagai proses perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktivitas rendah menuju sektor modern berproduktivitas tinggi. Namun, perpindahan itu tidak boleh dibaca secara mekanis. Dalam kerangka Pancasila, ukuran transformasi bukan hanya apakah pekerja berpindah sektor, melainkan apakah mereka memasuki pekerjaan yang lebih produktif, terlindungi, dan bermartabat.

BPS mencatat pada Februari 2026 terdapat 147,67 juta penduduk bekerja. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap 42,49 juta orang, atau 28,78 persen dari total penduduk bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,68 persen, sementara rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta. Data ini menunjukkan bahwa transformasi struktural Indonesia masih menyisakan agenda besar: mengangkat pekerja dari produktivitas rendah menuju pekerjaan layak dengan perlindungan sosial yang memadai.

Schumpeter (1942) memang menyebut inovasi sebagai proses *creative destruction*. Tetapi negara Pancasila tidak boleh membiarkan destruksi kreatif berubah menjadi destruksi sosial. Industrialisasi tidak boleh menghadirkan pekerjaan rentan, upah stagnan, permukiman buruh yang buruk, konflik agraria, dan komunitas lokal yang kehilangan ruang hidup. Kemajuan teknologi harus dikawal agar tidak memproduksi ketercerabutan sosial.

Batas Ekologis

Ambisi industrialisasi hijau Indonesia mengandung kontradiksi yang tidak kecil. Di satu sisi, Indonesia ingin menjadi simpul penting dalam rantai pasok teknologi

bersih dunia. Di sisi lain, sebagian agenda itu masih bertumpu pada energi fosil, ekstraksi mineral, dan tekanan terhadap ruang ekologis. Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru terbarukan pada 2025 mencapai 15,75 persen, sementara produksi batu bara berada di kisaran 790 juta ton. Stern (2007) menyebut perubahan iklim sebagai kegagalan pasar terbesar dalam sejarah ekonomi modern. Artinya, pasar tidak bisa dibiarkan sendirian menentukan nasib antar generasi. Tanpa kebijakan publik yang kuat, biaya ekologis hari ini akan dialihkan kepada warga miskin, daerah rentan, dan generasi mendatang. Raworth (2017), melalui *doughnut economics*, mengingatkan bahwa pembangunan harus memenuhi fondasi sosial tanpa menembus batas ekologis.

Ostrom (1990) juga memberi peringatan penting. Hutan, air, tanah, pesisir, dan wilayah mineral bukan ruang kosong administratif yang menunggu izin eksploitasi. Ia adalah *commons*: ruang hidup yang melekat pada relasi sosial, budaya, ekonomi, dan kewajiban antar generasi. Data Kementerian Kehutanan mencatat deforestasi netto Indonesia pada 2024 sebesar 175,4 ribu hektare. Angka itu mengingatkan bahwa pembangunan tidak pernah berlangsung di ruang hampa ekologis.

Keadilan Daerah Penghasil

Problem lain yang kerap luput adalah keadilan regional. Daerah penghasil sumber daya sering menanggung beban ekologis paling besar, tetapi belum selalu memperoleh manfaat yang sepadan. Mereka menjadi lokasi tambang, smelter, pelabuhan, kawasan industri, dan pembangkit listrik, tetapi tetap berhadapan dengan layanan dasar yang terbatas, keterampilan tenaga kerja yang belum memadai, dan ekonomi lokal yang kurang terdiversifikasi. World Bank dalam *Indonesia Country Climate and Development Report* mengingatkan bahwa sektor energi diperkirakan menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2030, terutama karena dominasi batu bara dalam pembangkitan listrik. Ini berarti politik energi tidak dapat dipisahkan dari politik industrialisasi. Industrialisasi hijau yang ditopang energi

kotor akan menciptakan paradoks moral: memproduksi teknologi masa depan dengan jejak ekologis masa lalu. Di sini, tesis Prebisch-Singer tetap relevan. Negara yang bergantung pada komoditas mentah atau komoditas olahan bernilai tambah rendah tetap rentan terhadap fluktuasi harga dan relasi pertukaran yang timpang. Indonesia tidak boleh puas menjadi eksportir mineral setengah matang dengan intensitas emisi tinggi. Transformasi sejati menuntut penguasaan teknologi, inovasi domestik, kemampuan manufaktur yang kompleks, dan distribusi manfaat yang lebih adil.

Ujian Pancasila

Setidaknya ada lima syarat agar industrialisasi hijau sejalan dengan Pancasila. Pertama, hilirisasi harus disyaratkan pada transfer teknologi, penguatan pemasok lokal, dan peningkatan keterampilan pekerja. Kedua, tata kelola lingkungan harus diperkuat melalui penegakan hukum, kajian dampak yang kredibel, dan persetujuan bermakna dari masyarakat terdampak. Ketiga, Indonesia memerlukan dana transisi berkeadilan bagi pekerja, komunitas lokal, dan daerah penghasil sumber daya. Keempat, insentif fiskal perlu diarahkan kepada manufaktur hijau, riset, inovasi, dan kemampuan produktif domestik, bukan sekadar akumulasi kapital. Kelima, daerah penghasil harus memperoleh manfaat yang lebih adil: infrastruktur, pendidikan vokasi, layanan kesehatan, diversifikasi ekonomi pasca-ekstraksi, dan pemulihan ekologis.

Pancasila tidak menolak industrialisasi. Ia menolak industrialisasi yang kehilangan akal budi keadilan. Pancasila tidak menolak pertumbuhan yang memprivatisasi keuntungan, tetapi mensosialisasikan ongkos ekologis dan sosial kepada pekerja, masyarakat adat, nelayan, petani, dan generasi mendatang. Pada Hari Lahir Pancasila, kita perlu mengingat bahwa ukuran tertinggi pembangunan bukan hanya berapa besar investasi masuk, melainkan apakah republik ini makin beradab dalam memperlakukan manusia, daerah, dan alamnya. (*)

Penulis adalah Economist, Public Policy Analyst, and Researcher of SmartID

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO

GORONTALO Post

Penerbit : PT. GORONTALO CEMERLANG
Pembina : Dahlan Iskhan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

DIVISI PRODUKSI

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi**: Deice Pomalingo, Caesar Ntoma, Diyanti T. Niyode, Sekretaris Redaksi: Agustina Said. **Koordinator HRD**: Chicilia Noviausti Arifin. **Koordinator IT**: Aslan Akuba

DIVISI ART & PERWAJAHAN

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis**: Muhammad Syukri

DIVISI USAHA

Manager Keuangan: Elvin Ambo. **Adriyanti Kadir (adm)**. **Manager Iklan**: Hariyanto Hamzah.

Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad **Design Iklan**: Oman Nasiboe.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. **Pemasaran Koran**: Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil**: Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial**: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran**: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

ALAMAT

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@ymail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Bonbol Siapkan Sekolah Unggulan

TILONGKABILA – GP – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program unggulan daerah di sektor pendidikan.

Salah satu langkah yang saat ini tengah dipersiapkan adalah pembentukan sekolah unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Meski masih berada pada tahap perencanaan, kesiapan untuk merealisasikan program tersebut terus berlanjut



Rachmatiyah Deu

dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Bone Bolango.

Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rachmatiyah Deu, memastikan bahwarencana pembentukan sekolah unggulan tersebut menjadi salah

satu agenda yang terus dimatangkan. Kepada awak media belum lama ini, aleg perempuan yang akrab disapa Kaka Tia itu menjelaskan bahwa rencana tersebut terungkap dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dan Dinas Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal terkait pengembangan sektor pendidikan menjadi pembahasan, termasuk kesiapan menghadirkan sekolah unggulan di Bone Bolango.

Menurut Kaka Tia, program sekolah unggulan merupakan bagian dari program prioritas yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Karena itu, Komisi I yang membidangi urusan pendidikan memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang sedang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan. Ia menilai rencana tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat baik dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih berkualitas bagi peserta didik di daerah. “Diknas mau melakukan satu terobosan yang menurut saya sangat bagus,” ujar Rachmatiyah Deu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses pembentukan sekolah unggulan nantinya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi. Dengan demikian, akan ada sekolah-sekolah yang diseleksi untuk ditetapkan sebagai sekolah unggulan. Sekolah yang terpilih akan mempersiapkan berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari fasilitas hingga tenaga pengajar yang memadai.

Selain itu, sekolah yang mengikuti proses seleksi akan dibagi pada setiap daerah pemilihan (dapil), sehingga pemerataan program dapat terwujud.

Ia pun berharap seluruh tahapan yang direncanakan dapat berjalan lancar sehingga tujuan pembentukan sekolah unggulan di Bone Bolango dapat segera direalisasikan. (csr)



(FOTO TANGKAPAN JAWAB)
KOMISI I RDP dengan Dinas Pendidikan belum lama ini.

Bapemperda Beri OPD Waktu Dua Minggu

Guna Menyempurnakan Masukan dan Mana Saja Tarif yang Akan Dirubah

TILONGKABILA – GP – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memberikan target waktu selama dua minggu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pajak dan retribusi daerah untuk melengkapi serta menyempurnakan berbagai poin masukan yang ingin diakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Tenggat waktu tersebut diberikan agar seluruh kebutuhan dan usulan dari masing-masing OPD dapat dirumuskan secara lebih matang sebelum masuk pada tahapan berikutnya dalam proses penyusunan regulasi.

Selain menyampaikan berbagai kebutuhan yang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam perubahan perda, OPD pengampu juga diberikan kesempatan

untuk melakukan penyempurnaan terhadap komponen tarif yang dinilai perlu dilakukan perubahan. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD terkait sehingga seluruh usulan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan.

Ketua Bapemperda, Romi Mohamad, memastikan bahwa waktu dua minggu yang diberikan pihaknya sudah cukup panjang untuk dimanfaatkan oleh OPD dalam menyiapkan dan menyempurnakan seluruh masukan yang akan diakomodir dalam Perda Perubahan PDRD. Dengan rentang waktu tersebut, setiap OPD memiliki ruang yang cukup untuk melakukan penyesuaian,



Romi Mohamad

pembahasan internal, serta merumuskan usulan yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam rancangan perubahan perda.

Romi menjelaskan bahwa setelah masa dua minggu tersebut berakhir, Bapemperda akan melanjutkan proses finalisasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum). Setelah tahapan tersebut selesai dan seluruh materi dinyatakan siap,

rancangan perda akan diajukan untuk fasilitasi ke tingkat provinsi. “Karena setelah dua minggu itu nanti kita akan finalisasi dengan Kemenkum dan setelah itu jika sudah siap akan lanjut ajukan fasilitasi ke Provinsi. Sehingga tinggal satu tahap lagi,” ujarnya. (csr)

Kemitraan yang Harmonis Harus Dibangun dengan Baik

TILONGKABILA – GP – Dua lembaga penyelenggara pemerintahan yakni Eksekutif dan Legislatif harus dibangun dengan baik. Itu demi mewujudkan tananan pemerintah yang kuat antar kedua lembaga pemerintahan tersebut.

Langkah kongkrit dalam memperkuat keduanya yakni kata ketua Dekab Bonbol Faisal Yunus perlu dilakukan

dengan menjalin hubungan kemitraan yang harmonis. Tak heran inilah yang diserukannya belum lama ini.

Menurutnya dalam membentuk komunikasi dan sinergitas yang kuat maka itu sudah jelas akan menjadikan bentuk upaya dalam menata pembangunan lebih maju. Karena itu niat baik ini harus dimiliki bersama dalam membangun

daerah tercinta. Sebagai bagian dari pemerintahan didalam daerah maka ini patut ditindaklanjuti dengan memelihara kekompakan antara sesama pihak pemangku terkait demi mewujudkan program yang berkemaslahatan masyarakat. “Maka mari kita jalin tatanan sinergitas pemerintahan yang solid antar sesama,” Supportnya baru-baru ini. (csr)

TUDUHAN BERAFILIASI DENGAN PENGELOLAAN DAPUR SPPG MBG

Waketum DPP Partai Hanura Beri Klarifikasi

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura mengklarifikasi tuduhan dan narasi hoaks tentang pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka membantah memiliki yayasan yang terafiliasi dengan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Hanura Bidang OKK Akhmad Muqowam menegaskan informasi berbentuk narasi, flyer maupun video yang memuat tuduhan tentang adanya yayasan milik Partai Hanura terlibat pengelolaan MBG, tidak benar.

Dia memastikan pihaknya telah melakukan upaya konfirmasi dan klarifikasi dari informasi yang beredar luas di media sosial itu. “DPP Partai Hanura memandang perlu menyampaikan klarifikasi

resmi kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, dalam menjaga integritas serta nama baik partai,” ujar Muqowam dalam jumpa pers di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dia menjelaskan, DPP Hanura mendatangi Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, silaturahmi itu bertujuan untuk mengklarifikasi sekaligus melakukan konfirmasi tentang informasi yang beredar di ruang publik. “DPP Hanura diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Benny Rhamdani, dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat Adil Supatra Akbar. Dalam pertemuan itu, kami diterima oleh Saudara Azim dan Saudara

Maulana dari pihak ICW. Proses klarifikasi dan konfirmasi berlangsung kurang lebih 40 menit,” ungkapnya.

Sementara itu, Adil Supatra Akbar menguraikan tentang isi pertemuan tersebut. Di antaranya, ungkap dia, informasi yang beredar di media sosial, baik dalam bentuk narasi, flyer, maupun video berbeda dengan hasil penelitian resmi ICW, dan berada di luar tanggung jawab ICW.

“Termasuk, informasi yang menyebut adanya ‘dua yayasan Partai Hanura’ dalam pengelolaan MBG. Itu tidak pernah tercantum dan ditemukan dalam dokumen hasil penelitian ICW yang telah diterbitkan dan menjadi konsumsi publik,” cetusnya. Dalam dokumen hasil penelitiannya, sambung Adil, ICW menyebut sebanyak 28 yayasan atau 27,45 persen dari 102 yayasan

mitra penyelenggara MBG yang ditelusuri, memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi ini timbul dari dugaan relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan dengan partai politik. “Relasi tersebut meliputi kedudukan dalam partai politik berupa jabatan sebagai pengurus pusat dan daerah, pengusungan oleh partai politik dalam kontestasi Pemilu, maupun status sebagai pejabat publik yang terpilih melalui pemilu,” terang dia. Adil mengakui dokumen hasil penelitian ICW menemukan empat orang anggota legislatif Hanura periode 2024-2029, yang menjadi bagian dari yayasan mitra MBG. Di antaranya, Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Hanura, yang terdaftar sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi. “Keterlibatan yang bersangkutan

dalam pengelolaan MBG merupakan tindakan dan kapasitas pribadi. Itu tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai, dan tidak serta-merta menjadikan yayasan tersebut sebagai yayasan milik Partai Hanura,” tegasnya. Muqowam mengatakan pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap kader yang memiliki keterlibatan dan keterkaitan dalam pengelolaan MBG. Menurutnya, mereka akan diproses sesuai mekanisme organisasi dan prinsip akuntabilitas politik internal partai. “Dewan Kehormatan Partai akan meminta penjelasan dan keterangan secara. Partai akan memberi sanksi tegas kepada semua kader, termasuk anggota DPRD Partai Hanura, yang bertindak di luar tanggung jawab tugas partai dan tugas negara,” ujar Muqowam. (jppnn)



DKP Gelar Lomba Bertutur Tingkat SD/MI

GORONTALO - GP - Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) menggelar Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kota Gorontalo Tahun 2026 yang digelar di Kota Gorontalo, Rabu (10/6/2026). Kegiatan yang dihadiri Kepala DKP, Siti Dahlia Syarif, dewan juri, para kepala sekolah se-Kota Gorontalo, guru pendamping, serta siswa-siswi peserta lomba itu, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid. Dalam sambutannya, Ismail Madjid menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi lisan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah yang mulai tergerus perkembangan zaman dan arus globalisasi.

"Pesan melalui tradisi lisan atau bertutur ini merupakan salah satu aset budaya lokal yang sebagian mulai diabaikan. Melalui kegiatan seperti lomba bertutur, jika terus digalakkan, akan mampu membangkitkan kecintaan anak-anak terhadap budaya daerah," ujarnya. Menurutnya, cerita rakyat yang dikemas dan ditampilkan dengan baik tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter anak yang cerdas, tangguh, dan memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. "Melalui cerita-cerita daerah, anak-anak dapat belajar tentang nilai moral, kearifan lokal, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya yang dimiliki," tambahnya.

Usai menyampaikan sambutan, Ismail secara resmi membuka lomba dengan mengajak seluruh peserta dan tamu undangan mengucapkan basmalah bersama. Pada kesempatan itu, Sekda Ismail juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar tetap semangat mengikuti perlombaan.

Ia mengingatkan bahwa hasil akhir bukanlah tujuan utama, melainkan proses belajar dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi. "Jangan berkecil hati apabila belum berhasil meraih juara. Kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda. Teruslah belajar, berlatih, dan mengasah kemampuan agar kelak dapat meraih prestasi yang lebih baik," pesannya.

Lomba Bertutur Tingkat SD/MI ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan literasi, serta melestarikan tradisi lisan dan cerita rakyat di kalangan generasi muda. (adv)



Sekda Kota Gorontalo, Ismail Madjid ketika membuka secara resmi kegiatan Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kota Gorontalo Tahun 2026 yang digelar di Kota Gorontalo, Rabu (10/6/2026).

POSISI KAS DAERAH PER 09 Juni 2026		
I Posisi Saldo Kas BUD per 08 Juni 2026 :		51.829.450.559,15
- Penerimaan Kas Daerah	655.416.912,57	
- per 09 Juni 2026		
- Pengeluaran Kas Daerah	1.060.071.089,00	
- per 09 Juni 2026		
II Saldo Akhir per 09 Juni 2026		51.424.796.382,72

Gorontalo, 10 Juni 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO
SELAKU BUD
Ttd
NURYANTO, Ak.M, Ec.Dev, CA
PEMBINA UTAMA MUDA

REVITALISASI BELLE LI MBUI DITARGETKAN RAMPUNG DESEMBER

Adhan: Hari Patriotik akan Diresmikan



Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel ketika menyerahkan pohon yang akan ditanam oleh ASN pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Selasa (9/6/2026).

Kolaborasi Guru dan Orang Tua Satu Cara Tumbuhkan Minat Baca Anak

GORONTALO - GP - Mendorong anak untuk minat membaca dapat dilakukan beragam cara. Satu diantaranya lewat kolaborasi guru dengan orang tua.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Ismail Madjid, saat menghadiri kegiatan Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kota Gorontalo tahun 2026 yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Gorontalo, Rabu (10/6/2026).

"Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah saja. Peran orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga swasta yang peduli juga merupakan faktor penting yang sangat kami harapkan," ujar Sekda Ismail.

Sekda Ismail menegaskan, penguatan budaya literasi tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah atau para guru. Maka dari itu, dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua, dalam menumbuhkan kebiasaan membaca pada anak.



Ismail Madjid

"Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan orang tua perlu berperan untuk meningkatkan minat baca anak-anak," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Ismail juga mengungkapkan perpustakaan menjadi salah satu sarana utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan wawasan. Maka dari itu, minat dan kemampuan membaca perlu terus ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan anak-anak.

Menurutnya, kemampuan membaca merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dengan budaya membaca

yang kuat, akan lahir generasi yang cerdas, berwawasan luas, serta mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.

Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Gorontalo yang telah menginisiasi Lomba Bertutur Tingkat SD/MI sebagai salah satu upaya mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan sekolah.

"Lomba bertutur bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi media untuk membangun kecintaan anak terhadap buku, membaca, dan melestarikan tradisi bertutur," katanya.

Ia berharap program-program apresiasi literasi seperti ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan berbagai elemen masyarakat.

"Dengan kolaborasi yang kuat, upaya membangun generasi literat di Kota Gorontalo akan semakin optimal," pungkasnya. (adv)

GORONTALO - GP - Pemerintah Kota Gorontalo mempercepat transformasi gedung Belle Li Mbui menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memangkas birokrasi dan memudahkan warga mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi.

Revitalisasi bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp1,9 miliar itu kini terus dikebut. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan fisik selesai pada akhir 2026 sehingga dapat segera memasuki tahap persiapan operasional.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat meninjau progres pekerjaan, menegaskan bahwa pembangunan MPP menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Pekerjaannya harus dipercepat. Target kita akhir tahun ini sudah selesai," ujar Adhan.

Menurutnya, keberadaan MPP akan mengubah pola pelayanan yang selama ini tersebar di berbagai kantor. Nantinya masyarakat cukup mendatangi satu gedung untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

Sejumlah layanan yang akan terintegrasi di dalam MPP antara lain administrasi kependudukan, layanan BPJS Kesehatan, pelayanan pernikahan,

hingga pusat kendali informasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berencana menghadirkan layanan instansi vertikal guna memperluas akses pelayanan bagi warga.

Adhan menjelaskan, konsep pelayanan satu atap tersebut dirancang untuk memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengurusan dokumen diharapkan menjadi lebih cepat dan mudah.

"Semua layanan yang dibutuhkan masyarakat akan dipusatkan di sini. Jadi warga tidak perlu lagi berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya," jelasnya.

Tak hanya mengedepankan kemudahan pelayanan, pemerintah juga menyiapkan berbagai sarana pendukung guna menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat saat mengakses layanan. Termasuk ruang bagi petugas dari instansi terkait yang akan memberikan pelayanan secara langsung di lokasi MPP.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Mal Pelayanan Publik Kota Gorontalo akan diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Patriotik pada 23 Januari 2027. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi tonggak baru reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo. (adv)



Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea ketika meninjau pekerjaan revitalisasi Belle Li Mbui, Selasa (9/6/2026).

DAYA Adicipta
Wipasa
Member of Daya Group

PEX 160

HONDA
One HEART.

BEKINGXPAN
NGANA PE GAYA

Torung Honda

special cashback
1.500.000*

*Syarat dan ketentuan berlaku

